



SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
KABUPATEN BANGKALAN

RENCANA KERJA



2023

KATA PENGANTAR

Dengan memanjatkan puji syukur kehadiran Tuhan Yang Maha Esa karena atas rahmat dan taufiq-Nya semata sehingga **“Rencana Kerja Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Bangkalan”** Tahun Anggaran 2023 ini dapat disusun.

Melalui penyusunan Rencana Kerja ini diharapkan akan diperoleh secara jelas dan rinci gambaran rencana kerja yang akan dilaksanakan selama kurun waktu satu tahun anggaran dalam rangka memenuhi tugas pokok dan fungsi sebagaimana tertuang dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.

Rencana Kerja ini diharapkan dapat digunakan sebagai pedoman dan arah kebijakan untuk meningkatkan kinerja Satuan Polisi Pamong Praja tahun anggaran 2023, sekaligus sebagai landasan pijakan guna penyusunan program dan kegiatan pada tahun – tahun berikutnya.

Pada akhirnya semoga penyusunan Rencana Kerja ini bermanfaat bagi kita semua.

**KEPALA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
KABUPATEN BANGKALAN**



RUDIYANTO.S.SOS.MM

Pembina Utama Muda

NIP. 19740513 199302 1 001

DAFTAR ISI

	Halaman
Kata Pengantar.....	i
Daftar Isi.....	ii
Daftar Tabel.....	iii
Bab 1 Pendahuluan.....	1
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Landasan Hukum.....	3
1.3 Maksud dan Tujuan.....	5
1.4 Sistematika Penulisan.....	5
Bab 2 Hasil Evaluasi Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu	7
2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja PD Tahun Lalu dan Capaian Renstra PD.....	7
2.2 Analisis Kinerja Pelayanan PD.....	29
2.3 Isu–isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi PD.....	31
2.4 Review terhadap Rancangan Awal RKPD.....	33
2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat.....	47
Bab 3 Tujuan dan Sasaran Perangkat Daerah.....	49
3.1 Telaah terhadap Kebijakan Nasional.....	49
3.2 Tujuan dan Sasaran Renja PD.....	49
Bab 4 Rencana Kerja dan Pendanaan Perangkat Daerah.....	51
4.1 Program dan Kegiatan.....	51
Bab 5 Penutup.....	65

DAFTAR TABEL

	Halaman
Tabel 2.1 Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Satpol PP dan Pencapaian Renstra PD s/d Tahun 2022 Satpol PP Kabupaten Bangkalan.....	10
Tabel 2.2. Pencapaian Kinerja Pelayanan Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Bangkalan	30
Tabel 2.3 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2023	34
Tabel 2.4 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat Tahun 2023	48
Tabel 3.1 Tujuan dan Sasaran PD	50
Tabel 4.1 Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Satpol PP Tahun 2023 dan Prakiraan Maju Tahun 2024 Kabupaten Bangkalan	52

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah (PD) merupakan dokumen perencanaan PD untuk periode 1 (satu) tahun. Undang-undang No 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah telah mewajibkan setiap Satuan Kerja Perangkat Daerah untuk menyusun Rencana Kerja (Renja) PD sebagai pedoman kerja selama periode 1 (satu) tahun dan berfungsi untuk menerjemahkan perencanaan strategis lima tahunan yang dituangkan dalam Renstra PD ke dalam perencanaan tahunan yang sifatnya lebih riil.

Sebagai sebuah dokumen resmi PD, Renja PD mempunyai kedudukan yang strategis antara lain:

1. Menjembatani antara perencanaan pada Perangkat Daerah (PD) dengan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD);
2. Sebagai implementasi pelaksanaan strategis jangka menengah daerah (RPJMD) dan Renstra PD yang menjadi satu kesatuan untuk mendukung pencapaian Visi dan Misi Daerah.
3. Renja PD digunakan sebagai dasar penyusunan Rencana Kerja Anggaran (RKA) Perangkat Daerah untuk penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota dan sebagai dasar pengusulan program/kegiatan yang akan dibiayai APBD Propinsi dan APBN.
4. Renja PD merupakan salah satu instrumen untuk evaluasi pelaksanaan program/kegiatan Instansi untuk mengetahui sejauh mana capaian kinerja yang tercatat dalam Rencana Kinerja Tahunan sebagai wujud dari kinerja Perangkat Daerah.

Dokumen Renja PD pada dasarnya merupakan suatu proses pemikiran strategis untuk menyikapi isu-isu yang berkembang dan mengimplementasikannya dalam program dan kegiatan PD. Kualitas dokumen Renja sangat ditentukan oleh kualitas program dan kegiatan yang akan dilaksanakan, sehingga penyusunan Renja PD sangat ditentukan oleh kemampuan PD dalam menyusun, mengorganisasikan, mengimplementasikan, mengendalikan dan mengevaluasi capaian program dan kegiatan sesuai tugas pokok dan fungsi PD.

Proses Penyusunan Renja PD berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, proses penyusunan Renja PD terdiri dari tiga tahapan utama yaitu tahap persiapan penyusunan, tahap penyusunan orientasi mengenai RKPD dan Renja PD, penyusunan agenda kerja, serta penyiapan data dan informasi. Penyusunan rancangan Renja PD merupakan tahapan awal yang harus dilakukan sebelum disempurnakan menjadi dokumen Renja PD yang definitif.

Dalam prosesnya, penyusunan rancangan Renja PD mengacu pada kerangka arahan yang dirumuskan dalam rancangan awal RKPD. Oleh karena itu penyusunan rancangan Renja PD dapat dikerjakan secara simultan/paralel dengan penyusunan rancangan awal RKPD, dengan fokus melakukan pengkajian terlebih dahulu terhadap kondisi eksisting PD, evaluasi pelaksanaan Renja PD tahun-tahun sebelumnya dan evaluasi kinerja terhadap pencapaian Renstra PD. Tahap penetapan rancangan akhir Rencana Kerja PD, Kepala PD menetapkan Renja PD untuk menjadi pedoman di lingkungan PD dalam menyusun program dan kegiatan prioritas PD pada tahun anggaran berkenaan.

RPJPD Kabupaten Bangkalan Tahun 2005 - 2025 merupakan Dokumen Perencanaan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) yang menjadi acuan penyusunan Dokumen Perencanaan Jangka Menengah (RPJMD). Tahapan dan skala prioritas yang ditetapkan mencerminkan urgensi permasalahan yang akan diselesaikan tanpa mengabaikan permasalahan lainnya. Oleh karena itu skala prioritas dalam setiap tahapan berbeda-beda, tetapi semua harus berkesinambungan dalam rangka mewujudkan sasaran pokok pembangunan jangka panjang.

RPJMD Kabupaten Bangkalan Tahun 2018 - 2023 merupakan tahap keempat Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Bangkalan Tahun 2005 - 2025. RPJMD tahap keempat melanjutkan visi pembangunan jangka panjang daerah yaitu mewujudkan Kabupaten Bangkalan sebagai Kabupaten Industri, Perdagangan dan Jasa yang tangguh menuju terciptanya masyarakat madani. Dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Bangkalan Tahun 2018 - 2023 disusun melalui tahapan perencanaan partisipatif dengan mengedepankan proses evaluasi, proyeksi dan

analisis terhadap faktor-faktor internal dan eksternal yang berpengaruh secara langsung maupun tidak langsung terhadap pembangunan daerah Kabupaten Bangkalan.

Rencana Kerja Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Bangkalan Tahun 2023 disusun sesuai dengan Peraturan Bupati Bangkalan Nomor 30 Tahun 2021 Tentang Rencana Kerja (RENJA) Perangkat Daerah Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bangkalan Tahun 2023. Dalam Renja memuat program, kegiatan, sub kegiatan dan lokasi yang disertai indikator kinerja dan pendanaan sesuai dengan tugas dan fungsi Satuan Polisi Pamong Praja. Selanjutnya Renja ini akan menjadi pedoman dalam Menyusun Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Bangkalan.

1.2. Landasan Hukum

Dalam penyusunan dokumen Rencana Awal (Ranwal) Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kabupaten Bangkalan didasarkan pada Landasan Hukum sebagaimana berikut:

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 Tentang Perubahan kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan

Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Tahun 2017 Nomor 1312);

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar Pada Standar Pelayanan Minimal Sub Urusan Kebakaran Daerah Kabupaten/Kota;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 121 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Mutu Pelayanan Dasar Sub Urusan Ketenteraman dan Ketertiban Umum di Provinsi dan Kabupaten/Kota;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Bangkalan Nomor 10 Tahun 2009 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Bangkalan Tahun 2009 – 2029 (Lembaran Daerah Kabupaten Bangkalan Tahun 2009 Nomor 4/E);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Bangkalan Nomor 12 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten bangkalan Tahun 2005 – 2025 (Lembaran Daerah Tahun 2011 Nomor 1/D);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Bangkalan Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bangkalan Tahun 2014 Nomor 1/D);
11. Peraturan Bupati Bangkalan Nomor 81 Tahun 2020 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja;
12. Peraturan Bupati Bangkalan Nomor 53 Tahun 2021 Tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Bangkalan Nomor 8 Tahun 2011 tentang Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah Tahun 2018-2023 di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bangkalan (Berita Daerah Kabupaten Tahun 2021 Nomor 47 seri E);
13. Peraturan Bupati Kabupaten Bangkalan Nomor 54 Tahun 2022 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Bangkalan Tahun 2023 (Berita Daerah Kabupaten Bangkalan Tahun 2022 Nomor 19/E);

1.3. Maksud dan Tujuan

Maksud dan tujuan penyusunan Renja Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Bangkalan Tahun 2023 adalah:

a. Maksud

Untuk merumuskan rencana kerja Satuan Polisi Pamong Praja untuk periode 1 (satu) tahun sebagai implementasi pelaksanaan Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Perubahan Renstra 2018-2023.

b. Tujuan

- 1) Sebagai pedoman penyusunan rencana anggaran Perangkat Daerah;
- 2) Sebagai pedoman pelaksanaan pelayanan Perangkat Daerah;
- 3) Sebagai pedoman pelaksanaan dan evaluasi program dan kegiatan.

1.4. Sistematika Penulisan

Sistematika penyusunan Renja Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Bangkalan Tahun 2023 berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tersebut di atas dibagi per bab sebagai berikut :

Bab 1 PENDAHULUAN

- 1.1 Latar Belakang
- 1.2 Landasan Hukum
- 1.3 Maksud dan Tujuan
- 1.4 Sistematika Penulisan

Bab 2 HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU

- 2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja PD Tahun Lalu dan Capaian Renstra PD
- 2.2 Analisis Kinerja Pelayanan PD
- 2.3 Isu – isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi PD
- 2.4 Review terhadap Rancangan Awal RKPD
- 2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Bab 3 TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

- 3.1 Telaahan terhadap Kebijakan Nasional
- 3.2 Tujuan dan Sasaran Renja PD

Bab 4 RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

4.1 Program dan Kegiatan

Bab 5 PENUTUP

BAB II

HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Satuan Polisi Pamong Praja Tahun Lalu dan Capaian Renstra Satuan Polisi Pamong Praja

Kualitas Renja Perangkat Daerah yang disusun sangat berpengaruh terhadap kualitas rencana pembangunan daerah dengan memastikan kesinambungan program dan kegiatan dalam pencapaian visi dan misi daerah yang telah ditetapkan. Dalam proses penyusunan perencanaan erat kaitannya dengan proses evaluasi yang berhubungan dengan pencapaian kinerja perangkat daerah serta mengidentifikasi sejauh mana keberhasilan pelaksanaan program dan kegiatan serta hambatan-hambatan yang dihadapi.

Evaluasi Renja tahun 2022 Satpol PP melaksanakan 4 Program, 15 Kegiatan dan 38 Sub Kegiatan adalah sebagai berikut:

1. Program Peningkatan Ketenteraman dan Ketertiban Umum
 - a. Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota dengan sub kegiatan :
 - Pencegahan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan Pengawalan.
 - Penindakan atas Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Berdasarkan Perda dan Perkada melalui Penertiban dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa.
 - Koordinasi Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Massa.
 - Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketenteraman dan Ketertiban Umum.
 - Peningkatan Kapasitas SDM Satuan Polisi Pamongpra ja dan Satuan Perlindungan Masyarakat termasuk dalam Pelaksanaan Tugas yang Bernuansa Hak Asasi Manusia.
 - Kerjasama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Teknik Pencegahan dan Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum.
 - b. Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan dengan sub kegiatan :
 - Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota

- Pengawasan atas Kepatuhan terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota.
- Penanganan atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota.
- c. Pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Kabupaten/Kota dengan sub kegiatan :
 - Pengembangan Kapasitas dan Karier PPNS.
- 2. Program Penanggulangan Bencana
 - a. Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana dengan sub kegiatan:
 - Pengembangan Kapasitas Tim Reaksi Cepat (TRC) Bencana.
 - b. Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana
 - Respon Cepat Kejadian Luar Biasa Penyakit/Wabah Zoonosis Prioritas
- 3. Program Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran
 - a. Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan, dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota dengan sub kegiatan :
 - Pencegahan Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota.
 - Pemadaman dan Pengendalian Kebakaran dalam Daerah.
 - Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran dan Non Kebakaran Daerah.
 - Pengadaan sarana dan prasarana pencegahan penanggulangan kebakara dan alat pelindung diri.
 - Pembinaan aparatur pemadam kebakaran.
 - b. Inspeksi Peralatan Proteksi Kebakaran dengan sub kegiatan :
 - Pendataan Sarana Prasarana Proteksi Kebakaran.
 - Penilaian Sarana dan Prasarana Proteksi Kebakaran.
- 4. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota;
 - a. Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah dengan sub kegiatan :
 - Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah.
 - Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD.
 - Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD.

- Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD.
- b. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah dengan sub kegiatan :
 - Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN.
 - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD.
 - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD.
- c. Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah dengan sub kegiatan:
 - Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD.
- d. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah dengan sub kegiatan :
 - Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi.
- e. Administrasi Umum Perangkat Daerah dengan sub kegiatan :
 - Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor.
 - Penyediaan Bahan Logistik Kantor.
 - Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan.
 - Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD.
- f. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah dengan sub kegiatan:
 - Pengadaan Mebel
 - Pengadaan Aset Tetap Lainnya
- g. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah dengan sub kegiatan:
 - Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik.
 - Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor.
- h. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah dengan sub kegiatan :
 - Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
 - Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya

Secara rinci evaluasi hasil pelaksanaan Renja Satuan Polisi Pamong Praja Tahun 2021 dan Pencapaian Renstra s.d Tahun 2021 tersaji dalam tabel 2.1 berikut ini:

Tabel 2.1 Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Satpol PP dan Pencapaian Renstra Satpol PP s/d Tahun 2022 Kabupaten Bangkalan

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes) / Kegiatan / Sub Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program/Kegiatan pada akhir periode Renstra Perangkat Tahun 2018 -2023		Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun 2020 (n-3)		Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu 2021 (n-2)						Target Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan Renja Perangkat Daerah tahun 2022 (n-1)		Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun Berjalan								
							Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2021 (n-2)		Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2021 (n-2)		Tingkat Realisasi (%)				Realisasi Capaian Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan s/d Tahun 2022 (Tahun Berjalan/n-1)		Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)						
			K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp							
1	2	3	4		5	6		7		8=(7/6)*100		9		10=(5+7+9)		11=(10/4)*100							
Permendagri Nomor 90 Tahun 2019 dan Kepmen 050-3708 Tahun 2020																							
5.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase terpenuhinya penunjang urusan pemerintahan		100.00%	Rp 13,309,692,774.00				100.00%	Rp 12,419,253,613.00			100.00%	Rp 12,283,832,072.00			100.00%	Rp 12,555,955,919.00			Rp 6,385,766,968.00		
5.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase tersusunnya Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		100%	Rp 80,393,400.00				100%	Rp 39,051,600.00			100%	Rp 39,051,450.00			100%	Rp 29,230,000.00			100%	Rp 7,990,000.00	
5.01.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan perangkat daerah yang disusun	3	Dokumen	Rp 39,593,400.00				3	dokumen	Rp 26,503,400.00	3	dokumen	Rp 26,503,400.00	100%	100%	2	dokumen	Rp 5,900,000	0	dokumen	Rp 2,580,000	0%

RENCANA KERJA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KABUPATEN BANGKALAN 2023

5.01.01.2.01.02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD yang tersusun	1	Doku men	Rp 5,400,000.00											1	doku men	Rp 11,030,000	0	doku men	Rp -	0%	
5.01.01.2.01.03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD yang tersusun	1	Doku men	Rp 5,000,000.00				1	doku men	Rp 4,755,000.00	1	doku men	Rp 4,754,950.00	10 0%	10 0%	1	doku men	Rp 4,550,000	0	doku men	Rp -	0%
5.01.01.2.01.04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD yang tersusun	1	Doku men	Rp 5,000,000.00																		
5.01.01.2.01.05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD yang tersusun	1	Doku men	Rp 5,000,000.00																		
5.01.01.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah dokumen laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi perangkat daerah yang tersusun	1	Lapor an	Rp 10,000,000.00				1	lapor an	Rp 7,793,200.00	1	lapor an	Rp 7,793,100.00	10 0%	10 0%	1	lapor an	Rp 7,750,000	0	lapor an	Rp 5,410,000	0%
5.01.01.2.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen evaluasi kinerja perangkat daerah yang disusun	1	Doku men	Rp 10,400,000.00																		
5.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Keuangan Perangkat Daerah yang terpenuhi		100%	Rp 6,157,066,051.00					100 %	Rp 6,038,696,850.00		100 %	Rp 5,735,279,193.00				100 %	Rp 6,022,477,251.00		100 %	Rp 3,219,926,112.00	

RENCANA KERJA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KABUPATEN BANGKALAN 2023

5.01.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Penyediaan Gaji dan tunjangan ASN	12	bulan	Rp 6,119,674,551.00				12	bulan	Rp 6,004,423,850.00	12	bulan	Rp 5,701,955,093.00	100%	95%	12	Bulan	Rp 6,009,385,251	6	Bulan	Rp 3,214,766,112	50%
5.01.01.2.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Dokumen Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD yang tersusun	1	Laporan	Rp 5,810,000.00				1	laporan	Rp 3,830,000.00	1	laporan	Rp 3,264,200.00	100%	85%	1	Laporan	Rp 7,692,000	0	Laporan	Rp 2,580,000	0%
5.01.01.2.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD yang tersusun	4	Laporan	Rp 31,581,500.00				4	laporan	Rp 30,443,000.00	4	laporan	Rp 30,059,900.00	100%	99%	18	Laporan	Rp 5,400,000	9	Laporan	Rp 2,580,000	225%
5.01.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah yang tersusun		100%	Rp 9,233,700.00					100%	Rp -		100%	Rp -				100%	Rp 5,735,200.00		100%	Rp 2,881,000.00	
5.01.01.2.03.01	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	jumlah dokumen penyusunan kebutuhan barang	4	Dokumen	Rp 3,910,200.00																		
5.01.01.2.03.05	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	1	Laporan	Rp 5,323,500.00												1	dokumen	Rp 5,735,200	0	dokumen	Rp 2,881,000	
5.01.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah yang terlaksana		100%	Rp 114,057,500.00					100%	Rp 207,650,000.00		100%	Rp 150,639,000.00				100%	Rp 22,500,000.00		100%	Rp -	

RENCANA KERJA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KABUPATEN BANGKALAN 2023

5.01.01. 2.05.02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	337	stel	Rp 33,057,500.00			337	stel	Rp 151,650,000.00	337	stel	Rp 150,639,000.00	100%	99%							
5.01.01. 2.05.9	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Peserta Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	20	Orang	Rp 81,000,000.00			17	orang	Rp 56,000,000.00	0	orang	Rp -	0%	0%	17	orang	Rp 22,500,000	0	orang	Rp -	0%
5.01.01. 2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Penyediaan Administrasi Umum Perangkat Daerah		84%	Rp 95,272,124.00				100%	Rp 145,911,750.00		100%	Rp 121,855,903.00				100%	Rp 190,855,518.00		100%	Rp 71,528,324.00	
5.01.01. 2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	12	bulan	Rp 2,199,949.00			12	bulan	Rp 1,213,700.00	12	bulan	Rp 8,250,000.00	100%	680%	12	bulan	Rp 2,769,650	0	bulan	Rp -	0%
1.05.01. 2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	20	unit	Rp -																	
1.05.01. 2.06.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	100	unit	Rp -																	
5.01.01. 2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Penyediaan Bahan Logistik Kantor	12	bulan	Rp 22,098,275.00			12	bulan	Rp 22,062,150.00	12	bulan	Rp 40,505,100.00	100%	184%	12	bulan	Rp 74,880,000	6	bulan	Rp 28,276,000	50%

RENCANA KERJA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KABUPATEN BANGKALAN 2023

5.01.01. 2.06.05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	1 2	bulan	Rp 16,247,900.00				1 2	bula n	Rp 9,347,900.00	1 2	bula n	Rp 4,653,700.00	10 0%	50 %	1 2	bula n	Rp 36,386,868	6	bula n	Rp 457,700	50%
5.01.01. 2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan	Jumlah Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan	5	Jenis	Rp -				1 2	bula n	Rp 3,840,000.00	1 2	bula n	Rp 3,840,000.00	10 0%	10 0%							
5.01.01. 2.06.08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Fasilitasi Kunjungan Tamu	1 2	Kali	Rp -																		
5.01.01. 2.06.09	Penyelenggar aan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Penyelleng garan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 6	Kali	Rp 54,726,000.00				1 6	kali	Rp 109,448,000.00	1 6	kali	Rp 64,607,103.00	10 0%	59 %	1 9 2	Kali	Rp 76,819,000	8 0	Kali	Rp 42,794,624	500%
5.01.01. 2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang terlaksana		100%	Rp 175,504,000.00													100 %	Rp 74,232,950.00			Rp 73,698,700.00	
1.05.01. 2.07.02	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	1 0	unit	Rp 77,404,000.00																		
1.05.01. 2.07.05	Pengadaan Mebel	Jumlah Pengadaan Mebel	5	Jenis	Rp 10,900,000.00												2	jenis	Rp 27,084,250	2	jenis	Rp 26,550,000	

RENCANA KERJA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KABUPATEN BANGKALAN 2023

1.05.01. 2.07.07	Pengadaan Aset Tetap Lainnya	Jumlah Pengadaan Aset Tetap Lainnya	2	Jenis	Rp 87,200,000.00											3	jenis	Rp 47,148,700	3	jenis	Rp 47,148,700		
5.01.01. 2.07.10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang diadakan	2	Jenis	Rp -																		
5.01.01. 2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		100%	Rp 6,364,325,399.00					100 %	Rp 5,709,183,413.00		100 %	Rp 5,989,263,528.00				100 %	Rp 5,752,307,000.00		100 %	Rp 2,859,357,125.00	
5.01.01. 2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 2	bulan	Rp 7,250,000.00				4	jenis	Rp 4,945,000.00	4	jenis	Rp 4,906,000.00	10 0%	99 %							
5.01.01. 2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	1 2	bulan	Rp 54,695,399.00				1 2	bula n	Rp 77,025,000.00	1 2	bula n	Rp 46,101,128.00	10 0%	60 %	1 2	bula n	Rp 65,820,000	6	bula n	Rp 22,844,225	50%
5.01.01. 2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	1 2	bulan	Rp 6,302,380,000.00				1 2	bula n	Rp 5,627,213,413.00	1 2	bula n	Rp 5,938,256,400.00	10 0%	10 6%	1 2	bula n	Rp 5,686,487,000	6	bula n	Rp 2,836,512,900	50%
5.01.01. 2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		92%	Rp 313,840,600.00					100 %	Rp 278,760,000.00		100 %	Rp 247,742,998.00				100 %	Rp 458,618,000.00		100 %	Rp 150,385,707.00	

RENCANA KERJA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KABUPATEN BANGKALAN 2023

		yang terlaksana																				
5.01.01. 2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan , Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Jasa Pemeliharaa n, Biaya Pemeliharaa n, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang disediakan	1 2	bulan	Rp 282,990,000.00			3	jenis	Rp 278,760,000.00	3	jenis	Rp 247,742,998.00	10 0%	89 %	1 2	bula n	Rp 427,898,000	6	bula n	Rp 147,695,707	50%
5.01.01. 2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan , Biaya Pemeliharaan , Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Jasa Pemeliharaa n, Biaya Pemeliharaa n, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang disediakan	1 2	bulan	Rp 9,000,000.00																	
5.01.01. 2.09.7	Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	Jumlah Pemeliharaa n Aset Tetap Lainnya	1 2	bulan	Rp 21,850,600.00											1 2	bula n	Rp 30,720,000	3	bula n	Rp 2,690,000	25%
1.05.02	PROGRAM PENINGKATA N KETENTERAM AN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase Penyelengg araan Peningkatan Ketertiban Umum dan Ketetrama n Masyarakat		100%	Rp 899,391,450.00				100 %	Rp 541,055,082.00		100 %	Rp 314,686,800.00				100 %	Rp 464,212,300.00		100 %	Rp 215,580,400.00	

5.01.02.2.01	Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota		100%	Rp 809,962,450.00			100 %	Rp 466,626,182.00	100 %	Rp 241,257,900.00		100 %	Rp 379,212,500.00	100 %	Rp 167,558,050.00	
1.05.02.2.01.01	Pencegahan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan Pengawasan	Jumlah penyelenggaraan patroli Penanganan covid 19	18 kali	Rp 299,925,000.00			10 kali		10 kali		100 %	130 kali		55 kali		306%
		Jumlah Penyelenggaraan pengamanan dalam penerapan prokes tramtibum yang dilaksanakan	18 kali				40 kali	Rp 187,460,000.00	40 kali	Rp 107,737,600.00	100 %	57 %	40 kali	8 kali	Rp 30,407,300	44%
		Jumlah penyelenggaraan sosialisasi masalah penindakan rokok ilegal dilaksanakan	6 kali				5 kali		5 kali		100 %	11 kali	Rp 138,579,750	2 kali	Rp 96,181,250	33%

								16	kali		16	kali		100%								
1.05.02.2.01.02	Penindakan atas Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Berdasarkan Perda dan Perkada melalui Penertiban dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa	Jumlah penindakan atas gangguan Ketentraman dan Ketertiban	48	Kali	Rp 79,425,000.00			8	kali	Rp 88,000,000.00	2	kali	Rp 6,577,600.00	25%	7%	12	kali	Rp 22,750,000	0	kali	Rp -	0%
1.05.02.2.01.03	Koordinasi Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah koordinasi penanganan covid 19 antar kecamatan	24	Kali	Rp 49,000,000.00			24	kali	Rp 43,996,480.00	14	kali	Rp 20,429,500.00	58%	46%	17	kali	Rp 21,550,000	6	kali	Rp 3,732,000	25%

RENCANA KERJA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KABUPATEN BANGKALAN 2023

1.05.02. 2.01.07	Kerjasama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Teknik Pencegahan dan Penanganan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum	Jumlah penyelenggaran kerjasama antar lembaga dan kemitraan dalam penanganan covid 19	3 6	Kali	Rp 76,940,000.00			3 6	kali	Rp 67,749,915.00	1 6	kali	Rp 44,735,500.00	44 %	66 %	2 6	kali	Rp 16,925,000	1 7	kali	Rp 9,624,000	47%
								6	kali		3	kali		50 %								
1.05.02. 2.01.08	Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Ketentraman dan Ketertiban Umum	Jumlah sarana dan prasarana yang diadakan dan yang dipelihara	3	unit	Rp 32,346,000.00			3	jenis	Rp 36,660,000.00	3	jenis	Rp 35,430,000.00	10 0%	97 %							
1.05.02. 2.01.09	Penyusunan SOP Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat	jumlah dokumen SOP yang disusun	7	Doku men	Rp 12,153,200.00																	
1.05.02. 2.01.10	Penyediaan Layanan dalam rangka Dampak Penegakan Peraturan Daerah dan Perkada	jumlah wni terdampak pelaksanaan kegiatan trantibum yang terlayani	2 0	Oran g	Rp 56,150,000.00																	

RENCANA KERJA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KABUPATEN BANGKALAN 2023

1.05.02. 2.01.04	Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketentraman dan Ketertiban Umum	Jumlah penyeleng- araan pemberday- aan SATLINMAS	1 8	Kali	Rp 116,318,250.00			1	kali	Rp 14,444,900.00	1	kali	Rp 10,337,900.00	10 0%	72 %	3	kali	Rp 36,420,250	2	kali	Rp 23,432,000	11%
		Jumlah Pos Ronda yang dibangun														2	unit	Rp 50,000,000	0	unit	Rp -	0%
1.05.02. 2.01.05	Peningkatan Kapasitas SDM Satuan Polisi Pamongpraja dan Satuan Perlindungan Masyarakat termasuk dalam Pelaksanaan Tugas yang Bernuansa Hak Asasi Manusia	Jumlah peserta Peningkatan Kapasitas SDM Satuan Polisi Pamongpraj a dan Satuan Perlindungan Masyarakat termasuk dalam Pelaksanaan Tugas yang Bernuansa Hak Asasi Manusia	2 4	kali	Rp 87,705,000.00			2	kali	Rp 28,314,887.00	2	kali	Rp 16,009,800.00	10 0%	57 %	2 6	oran g	Rp 4,212,500	2 0	oran g	Rp 4,181,500	83%
1.05.02. 2.02	Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten/K ota dan Peraturan Bupati/Wali Kota	Terselengga ranya Pelaksanaan Kegiatan Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten/ Kota dan Peraturan Bupati/Wali Kota		58%	Rp 73,865,500.00				100 %	Rp 58,865,400.00		100 %	Rp 57,865,400.00				100 %	Rp 84,999,800.00			Rp 48,022,350.00	

RENCANA KERJA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KABUPATEN BANGKALAN 2023

1.05.02.2.02.01	Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota	Jumlah Peserta yang mendapatka n sosialisasi	500	Oran g	Rp 15,000,100.00											185	oran g	Rp 39,630,200	185	oran g	Rp 39,000,200	37%
1.05.02.2.02.02	Pengawasan atas Kepatuhan terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota	Jumlah kegiatan pengawasan kepatuhan masyarakat yang terselenggar a	56	Kali	Rp 27,496,000.00			31	kali	Rp 27,496,000.00	31	kali	Rp 27,496,000.00	100%	100%	12	kali	Rp 6,539,450	0	kali	Rp -	0%
1.05.02.2.02.03	Penanganan atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota	Jumlah Penanganan Pelanggaran Covid -19			Rp 31,369,400.00			29	kali	Rp 31,369,400.00	29	kali	Rp 30,369,400.00	100%	97%	81	kali	Rp 38,830,150	20	kali	Rp 8,552,650	0%
		Jumlah Penanganan Pelanggaran Perda dan Perbup	48	Kali												13	kali		2	kali	Rp 469,500	4%
1.05.02.2.03	Pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Kabupaten/Kota	Terselengga ranya pelaksanaan kegiatan Pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Kabupaten/ Kota		100%	Rp 15,563,500.00				100%	Rp 15,563,500.00		100%	Rp 15,563,500.00					Rp -			Rp -	
1.05.02.2.03.01	Pengembang an Kapasitas dan Karier PPNS	Jumlah penyelengg aaraan pengemban gan Kapasitas dan karir PPNS	2	Kali	Rp 15,563,500.00			26	oran g	Rp 15,563,500.00	26	oran g	Rp 15,563,500.00	100%	100%							

1.05.03	PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA	Persentase penyelenggaraan penanggulangan bencana		100%	Rp 252,057,127.00						Rp 10,167,700.00					Rp 9,367,700.00					Rp 30,787,500.00			Rp 13,649,000.00	
1.05.03.2.02	Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	Terselenggaranya Pelaksanaan Kegiatan Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana		100%	Rp 89,604,577.00						Rp 10,167,700.00					Rp 9,367,700.00					Rp 5,787,500.00			Rp 5,710,500.00	
1.05.03.2.02.01	Penyusunan Rencana Penanggulangan Bencana Kabupaten/Kota	jumlah Dokumen Penyusunan Rencana Penanggulangan Bencana Kabupaten/Kota	1	Dokumen	Rp 18,000,000.00																				
1.05.03.2.02.02	Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana Kabupaten/Kota	jumlah peserta yang mengikuti pelatihan	20	Orang	Rp 18,000,000.00																				
1.05.03.2.02.04	Penyediaan Peralatan Perlindungan dan Kesiapsiagaan terhadap Bencana	Tersedianya Peralatan Perlindungan dan Kesiapsiagaan terhadap Bencana			Rp 37,977,500.00																				

RENCANA KERJA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KABUPATEN BANGKALAN 2023

	Penanganan Pascabencana Kabupaten/Kota	Jumlah Penanganan Pascabencana Kabupaten/Kota			Rp -																	
1.05.03.2.02.08	Pengembangan Kapasitas Tim Reaksi Cepat (TRC) Bencana Kabupaten/Kota	jumlah peserta Tim Reaksi Cepat yang dilatih	2	Kali	Rp 15,627,077.00			1	kali	Rp 10,167,700.00	1	kali	Rp 9,367,700.00	100%	92%	30	peserta	Rp 5,787,500	30	peserta	Rp 5,710,500	1500%
1.05.03.2.03	Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	Terselenggaranya Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana			Rp 162,452,550.00					Rp -			Rp -					Rp 25,000,000.00			Rp 7,938,500.00	
1.05.03.2.03.01	Respon Cepat Kejadian Luar Biasa Penyakit wabah zoonosis	Terselenggaranya monitoring	50	Kali	Rp 105,642,550.00											69	kali	Rp 25,000,000	37	kali	Rp 7,938,500	74%
		Terselenggaranya PAM Insidentil																				

1.05.03. 2.03.02	Respon Cepat Darurat Bencana Kabupaten/K ota	jumlah Respon Cepat Darurat Bencana Kabupaten/ Kota	5 0	Kali	Rp 21,710,000.00															
1.05.03. 2.03.03	Pencarian, Pertolongan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/K ota	jumlah pelaksanaan evakuasi	5 0	Kali	Rp 35,100,000.00															
1:05:04	PROGRAM PENCEGAHA N, PENANGGUL ANGAN, PENYELAMAT AN KEBAKARAN DAN PENYELAMAT AN NON KEBAKARAN	Persentase Penyelengg araan Pelayanan Pecegahan, Penanggula ngan, Penyelamat an Kebakaran dan Non Kebakaran			Rp 43,640,000.00				Rp 2,142,934,700.0 0		Rp 2,081,784,300.00				Rp 100,000,000.00			Rp 49,471,000.00		
1.05.04. 2.01	Pencegahan, Pengendalian , Pemadaman, Penyelamata n, dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/K ota	Terselengga ranya Pelaksanaan Kegiatan Pencegahan , Pengendalia n, Pemadaman , Penyelamat an, dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran			Rp 33,580,000.00				Rp 2,142,934,700.0 0		Rp 2,081,784,300.00				Rp 90,800,000.00			Rp 48,321,000.00		

		dalam Daerah Kabupaten/ Kota																					
1.05.04.2.01.01	Pencegahan Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/K ota	Jumlah terlaksanan ya kegiatan pencegahan kebakaran	10	kegiatan	Rp 8,400,000.00				3	kegiatan	Rp 8,400,000.00	3	kegiatan	Rp 10,590,000.00	100%	126%	10	kali	Rp 19,830,000	1	kali	Rp 5,875,000	10%
1.05.04.2.01.02	Pemadaman dan Pengendalian Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/K ota	jumlah terlaksanan ya kegiatan pemadaman kebakaran	25	kali	Rp 9,700,000.00				5	kegiatan	Rp 9,700,000.00	7	kegiatan	Rp 13,800,000.00	140%	142%	20	kali	Rp 21,000,000	9	kali	Rp 8,505,000	36%
1.05.04.2.01.03	Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran dan Non Kebakaran	jumlah terlaksanan ya kegiatan penyelamatan kebakaran dan non kebakaran	20	kali	Rp 10,500,000.00				5	kali	Rp 8,700,000.00	6	kali	Rp 5,460,000.00	120%	63%	20	kali	Rp 21,000,000	13	kali	Rp 12,495,000	65%

RENCANA KERJA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KABUPATEN BANGKALAN 2023

1.05.04. 2.01.06	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri	jumlah jenis sarana dan prasarana pencegahan , penanggulan gan kebakaran,p encarian, pertolongan dan evakuasi terhadap kondisi membahaya kan yangdiadaka n	1	jenis	Rp 4,980,000.00				1	unit	Rp 2,105,330,000.00	7	unit	Rp 2,040,674,000.00	70 0%	97 %	5	jenis	Rp 20,820,000	2	jenis	Rp 18,906,000	200%
1.05.04. 2.01.07	Pembinaan Aparatur Pemadam Kebakaran	Jumlah Aparatur yang mengikuti pembinaan							2 0	oran g	Rp 10,804,700.00	2 0	oran g	Rp 11,260,300.00	10 0%	10 4%	1 4	oran g	Rp 8,150,000	6	oran g	Rp 2,540,000	0%
1.05.04. 2.02	Inspeksi Peralatan Proteksi Kebakaran	Terselengga ranya Pelaksanaan Kegiatan Inspeksi Proteksi Kebakaran																Rp 9,200,000.00			Rp 1,150,000.00		
1.05.04. 2.02.01	Pendataan Sarana Prasarana Proteksi Kebakaran	Jumlah Laporan data tersedianya Sarana Prasarana Proteksi Kebakaran	1	Doku men													1	doku men	Rp 4,600,000	0	doku men	Rp 1,150,000	0%

1.05.04. 2.02.02	Penilaian Sarana Prasarana Proteksi Kebakaran	jumlah data sarana dan prasarana proteksi kebakaran yang di nilai	1	Doku men											1	doku men	Rp 4,600,000	0	doku men	Rp -	0%
1.05.04. 2.03	Investigasi Kejadian Kebakaran	Terselengga ranya Kegiatan Investigasi Kejadian kebakaran																			
1.05.04. 2.03.01	Investigasi Kejadian Kebakaran, meliputi Penelitian dan Pengujian Penyebab Kejadian Kebakaran	Jumlah Investigasi Kejadian Kebakaran, meliputi Penelitian dan Pengujian Penyebab Kejadian Kebakaran																			
1.05.04. 2.04	Pemberdayaa n Masyarakat dalam Pencegahan Kebakaran	Terselengga ranya Kegiatan Pemberdaya an Masyarakat dalam Pencegahan Kebakaran																			

RENCANA KERJA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KABUPATEN BANGKALAN 2023

1.05.04. 2.04.01	Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran melalui Sosialisasi dan Edukasi Masyarakat	cakupan kegiatan sosialisasi dan edukasi masyarakat dalam pencegahan penanggulangan kebakaran																		
1.05.04. 2.05	Penyelenggaraan Operasi Pencarian dan Pertolongan terhadap Kondisi Membahayakan Manusia	Terselenggaranya Penyelenggaraan Operasi Pencarian dan Pertolongan terhadap Kondisi Membahayakan Manusia			Rp 10,060,000.00															
1.05.04. 2.05.03	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pencarian dan Pertolongan terhadap Kondisi Membahayakan Manusia/Penyelamatan dan Evakuasi	jumlah Sarana dan Prasarana Pencarian dan Pertolongan terhadap Kondisi Membahayakan yang diadakan	2 0	Jenis	Rp 10,060,000.00															
TOTAL					Rp 14,504,781,351.00			Rp 15,113,411,095.00			Rp 14,689,670,872.00				Rp 13,150,955,719.00			Rp 6,664,467,368.00		

2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Satpol PP

Dalam rangka peningkatan kualitas penyelenggaraan pelayanan kepada masyarakat Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Bangkalan perlu menentukan sasaran yang ingin dicapai. Analisis kinerja pelayanan Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Bangkalan menggunakan indikator yang mengacu pada Standar Pelayanan Minimal (SPM) berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 121 Tahun 2018 dan Indikator Kinerja Kunci (IKK) berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020, dengan sasaran target sesuai dengan Perubahan Renstra Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Bangkalan periode 2018-2023 dan/atau berdasarkan atas hasil analisis standar kebutuhan pelayanan.

Pelayanan dasar ketentraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat merupakan urusan wajib Pemerintah Daerah yang dilaksanakan Satpol PP tentunya menghadapi kompleksitas permasalahan, terutama di bidang penegakannya. Beberapa hal yang menjadi kendala antara lain sosialisasi Perda kepada masyarakat belum dapat optimal sehingga pemahaman masyarakat terhadap Perda masih sangat kurang sehingga tingkat pelanggaran yang dilakukan cukup tinggi.

Dengan diterbitkannya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 121 Tahun 2018 Tentang Standar mutu pelayanan dasar Sub Urusan Ketentraman dan Ketertiban Umum di Provinsi dan Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati Bangkalan nomor 76 Tahun 2019 tentang Pedoman Penetapan dan Rencana Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bangkalan, maka Satpol PP Kabupaten Bangkalan menyesuaikan beberapa kebijakan pada Program kegiatan diselaraskan dengan Target Capaian Standar Pelayanan Minimal yang telah ditetapkan.

Untuk itu dalam mengukur keberhasilan dari tujuan dan sasaran kinerja Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Bangkalan tahun 2023, maka ditetapkan rencana tingkat capaian kinerja pelayanan yang menjadi tolak ukur atau patokan penilaian keberhasilan dan kegagalan penyelenggaraan pemerintahan dalam mewujudkan proses perencanaan yang efektif, efisien dan partisipatif serta untuk mencapai visi dan misi yang telah ditetapkan dalam renstra Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Bangkalan. Adapun tabel analisis pencapaian kinerja pelayanan Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Bangkalan adalah sebagai berikut :

Tabel 2.2. Pencapaian Kinerja Pelayanan Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Bangkalan

No	Indikator	SPM/ Standar Nasional	IKK	Target Renstra PD				Realisasi Capaian		Proyeksi		Catatan Analisis
				Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	
1	Persentase tingkat Penyelesaian Pelanggaran K3 (Ketenteraman, Ketertiban dan Keamanan)			100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	
2	Persentase Penyelenggaraan Penegakan Peraturan Daerah/Peraturan Kepala Daerah			100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	
3	Persentase Cakupan Petugas Satlinmas yang diberdayakan di kabupaten/kota		Jumlah desa / Jumlah Petugas Linmas	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	
4	Jumlah Sarana dan Prasarana dalam penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum	Pemenuhan Standart SarPras Satpol PP dalam penyelenggaraan Tramtibumlinmas		3 Jenis	3 Jenis	3 Jenis	3 Jenis	3 Jenis	3 Jenis	3 Jenis	3 Jenis	
5	Jumlah WNI yang memperoleh layanan akibat dari dampak penegakan hukum Perda dan Perkada	Pelayanan warga akibat dari dampak penegakan hukum Perda dan Perkada				100%	100%			100%		
6	Persentase penyelenggaraan Pelayanan penanggulangan bencana	-			100%	100%	100%			100%		
7	Persentase penyelenggaraan Pelayanan Pemadam kebakaran dan penyelamatan non kebakaran	-		85%	90%	95%	100%	97%	100%	98%	100%	
8	Indeks Kepuasan Aparatur terhadap pelayanan kesekretariatan			100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	
9	Persentase Aparatur Satpol PP dan Linmas yang telah mengikuti Diklat dan Pengembangan kapasitas SDM	Standart Peningkatan Kapasitas Aparatur Satpol PP dan Satlinmas		100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	

2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Bangkalan

Aspek strategis Satuan Polisi Pamong Praja berdasarkan Undang–undang no. 23 tahun 2013 pasal 12 ayat 1 disebutkan bahwa, ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat merupakan urusan pemerintahan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar yang harus diselenggarakan dan menjadi tugas dari Kepala Daerah. Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Bangkalan sebagai kepanjangan tangan dari Kepala Daerah untuk membantu dalam hal penyelenggaraan pemeliharaan ketentraman ketertiban masyarakat, dibentuk untuk menegakkan PerDa dan PerBup serta menyelenggarakan perlindungan masyarakat.

Suasana tentram dan tertib menjadi modal dasar baik dalam menjalankan roda pemerintahan maupun roda perekonomian tidak akan berjalan dengan optimal apabila kondisi ketentraman ketertiban dan perlindungan masyarakat tidak terselenggara dengan baik. Oleh sebab itu ketiga aspek pelayanan dasar tersebut menjadi aspek strategis bagi Satuan Polisi Pamong Praja sehingga pemerintah berkewajiban mendukung penguatan kelembagaan dan penganggaran guna menunjang pelaksanaan terciptanya kondisi Tentram, Aman, Tertib serta Perlindungan Masyarakat yang kondusif dan berjalan secara optimal.

Dalam pelaksanaan tugas yang seperti dialami saat ini ditengah-tengah maraknya Kejadian Luar Biasa mengenai adanya Pandemi COVID-19 Satpol PP Kabupaten Bangkalan, mempunyai peran penting demi terciptanya kondisi yang baik, aman dan kondusif. Maka setiap institusi Pemerintah Pusat Maupun Pemerintah Daerah berupaya keras untuk mempercepat penanganan dari pandemi covid-19 yang ada di Indonesia. Pemerintah Pusat juga melalui Presiden Republik Indonesia menerbitkan Keputusan Presiden Nomor 7 Tahun 2020 tentang Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19.

Dampak covid 19 tentunya sangat berpengaruh terhadap capaian kinerja Satpol PP. Akan tetapi dengan keterbatasan tersebut tetap diupayakan optimalisasi capaian kinerja dengan membuat skala prioritas kegiatan yang mempunyai dampak luas pada peningkatan layanan publik dan membantu penanggulangan wabah Covid 19 salah satunya dengan melaksanakan kegiatan Satuan Tugas Percepatan Penanganan Covid 19. Kejadian Luar Biasa ini tentu sangat berkaitan dengan kondisi ketentraman, Ketertiban umum dan perlindungan masyarakat Kabupaten Bangkalan yang dampaknya sangat signifikan dan berpengaruh pada segala aspek. Tantangan dan peluang yang dihadapi oleh Satpol PP Kabupaten Bnagkalan dalam menjalankan tugas dan fungsinya, serta tuntutan terhadap layanan Kabupaten

Bangkalan sebagai lembaga Penegak perda dan pemelihara Ketentraman Ketertiban Umum di daerah adalah cepatnya perubahan lingkungan eksternal yang membawa implikasi pada masyarakat yang semakin kritis dan sadar akan haknya dapat memperoleh pelayanan publik dan seringkali hak- hak yang mereka perjuangkan adalah hak pribadi yang bersinggungan dengan ketentraman dan ketertiban umum serta peraturan hukum yang berlaku. Perilaku tersebut menuntut peningkatan profesional dalam pelayanan dan dilengkapi dengan sikap yang konsisten dan adil.

Berdasarkan identifikasi analisis terhadap kinerja pelayanan Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Bangkalan, permasalahan dan hambatan dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi, capaian terhadap visi dan misi kepala daerah, capaian program nasional, tantangan dan peluang maka ditentukan isu strategis Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Bangkalan sebagai berikut :

1. Keterbatasan kuantitas dan kualitas SDM aparatur serta sarana dan prasarana di Satuan Polisi Pamong Praja
2. Keterbatasan/ belum adanya Anggaran yang khusus diperuntukkan Standart Penilaian Minimal (SPM)

Strategi dan solusi untuk mengatasi permasalahan tersebut adalah :

1. Meningkatkan kualitas lembaga dan SDM Satuan Polisi Pamong Praja dan memantapkan koordinasi lintas Perangkat Daerah dalam penyelenggaraan peningkatan keamanan dan ketertiban umum
2. Meningkatkan fungsi dan peran Satuan Polisi Pamong Praja dalam rangka menjaga ketentraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat
3. Meningkatkan kinerja Satuan Polisi Pamong Praja melalui : Kerjasama dengan lembaga lainnya (Pihak ketiga/swasta) dan menata personil yang ada dengan mengoptimalkan serta mensinergikan kinerja personil dengan penempatan posisi sesuai dengan keahliannya.
4. Optimalisasi sinergi dengan Satlinmas Desa agar saling bekerjasama dan berkoordinasi dengan baik.

2.4. Review Terhadap Rancangan Awal RKPD

Berdasarkan Rancangan Awal RKPD yang memperhatikan sasaran dan prioritas pembangunan daerah, maka Rencana Kerja Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Bangkalan Tahun 2023 dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 2.3 Review terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2023

No	Rancangan Awal RKPD						Hasil Analisis Kebutuhan					
	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian		Pagu Indikatif (Rp)	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian		Kebutuhan Dana (Rp)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1.05.01	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten / Kota		Persentase terpenuhinya penunjang urusan pemerintahan		98.00%	14,628,936,491.00	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten / Kota		Persentase terpenuhinya penunjang urusan pemerintahan		100.00%	12,196,047,476.00
5.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		Persentase tersusunnya Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		100.00%	80,905,481.00	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		Persentase tersusunnya Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		100.00%	32,649,550.00
5.01.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Satpol PP	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah yang tersusun	2	Dokumen	40,000,000.00	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Satpol PP	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	3	Dokumen	Rp 18,212,150
5.01.01.2.01.02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Satpol PP	Jumlah Dokumen RKA-SKPD yang disusun	1	Dokumen	5,505,481.00	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Satpol PP	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1	Dokumen	Rp 1,736,000
5.01.01.2.01.03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Satpol PP	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD yang disusun	1	Dokumen	5,000,000.00	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Satpol PP	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1	Dokumen	Rp 1,729,750
5.01.01.2.01.04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Satpol PP	Jumlah Dokumen DPA-SKPD yang disusun	1	Dokumen	5,000,000.00	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Satpol PP	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1	Dokumen	Rp 378,150
5.01.01.2.01.05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Satpol PP	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD yang disusun	1	Dokumen	5,000,000.00	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Satpol PP	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1	Dokumen	Rp 378,150

RENCANA KERJA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KABUPATEN BANGKALAN 2023

5.01.01.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Satpol PP	Jumlah Dokumen Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD yang disusun	1	Dokumen	10,000,000.00	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Satpol PP	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	1	Laporan	Rp 3,594,050
5.01.01.2.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Satpol PP	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang disusun	8	Laporan	10,400,000.00	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Satpol PP	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	6	Laporan	Rp 6,621,300
5.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		Persentase Administrasi Keuangan Perangkat Daerah yang terpenuhi		100%	6,769,642,007.00	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		Persentase Administrasi Keuangan Perangkat Daerah yang terpenuhi		100%	6,197,444,676.00
5.01.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Satpol PP	Jumlah Penyediaan Gaji dan tunjangan ASN	80	Orang	6,731,642,007.00	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Satpol PP	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	80	Orang/bulan	6,184,470,476.00
5.01.01.2.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Satpol PP	Jumlah Dokumen Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD yang tersusun	1	Dokumen	6,000,000.00	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Satpol PP	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1	Laporan	7,139,550.00
5.01.01.2.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Satpol PP	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/ Semesteran SKPD yang tersusun	18	Laporan	32,000,000.00	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Satpol PP	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	18	Laporan	5,834,650.00
5.01.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah		Persentase Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah yang tersusun		100%	9,500,000.00	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah		Persentase Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah yang tersusun		100%	1,611,350.00
5.01.01.2.03.01	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Satpol PP	Jumlah Laporan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD yang tersusun	1	Laporan	4,000,000.00	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Satpol PP	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD			
5.01.01.2.03.05	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Satpol PP	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	1	Laporan	5,500,000.00	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Satpol PP	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	7	Laporan	Rp 1,611,350

5.01.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		Persentase Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah yang terlaksana		100%	124,994,150.00	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		Persentase Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah yang terlaksana		100%	23,672,000.00
5.01.01.2.05.02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Satpol PP	Jumlah Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	337	Buah	35,894,150.00	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Satpol PP	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan			
5.01.01.2.05.09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Satpol PP	Jumlah Peserta Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	20	Orang	89,100,000.00	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Satpol PP	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	11	Orang	Rp 23,672,000
5.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah		Persentase Penyediaan Administrasi Umum Perangkat Daerah		92%	109,855,543.00	Administrasi Umum Perangkat Daerah		Persentase Penyediaan Administrasi Umum Perangkat Daerah		92%	64,332,500.00
5.01.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Satpol PP	Jumlah Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	12	Unit	2,419,943.00	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Satpol PP	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	4	Paket	Rp 1,791,800
5.01.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Satpol PP	Jumlah Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	20	Unit	-	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Satpol PP	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12	Paket	Rp 15,662,600
5.01.01.2.06.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Satpol PP	Jumlah Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	100	Unit	-	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Satpol PP	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	12	Paket	Rp 1,828,750
5.01.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Satpol PP	Jumlah Penyediaan Bahan Logistik Kantor	12	Unit	24,237,000.00	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Satpol PP	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	8	Paket	Rp 9,000,000

RENCANA KERJA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KABUPATEN BANGKALAN 2023

5.01.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Satpol PP	Jumlah Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	12	Jenis	18,000,000.00	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Satpol PP	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	12	Paket	Rp 981,350
5.01.01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Satpol PP	Jumlah Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	5	Jenis	5,000,000.00	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Satpol PP	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang Disediakan	4	Dokumen	Rp 1,620,000
5.01.01.2.06.08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Satpol PP	Jumlah Fasilitasi Kunjungan Tamu	12	Kali	-	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Satpol PP	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	12	Laporan	Rp 4,958,000
5.01.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Satpol PP	Jumlah Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	16	Kali	60,198,600.00	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Satpol PP	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	10	Laporan	Rp 28,490,000
5.01.01.2.06.11	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Satpol PP	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	-	-	-	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Satpol PP	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	0	Dokumen	-
5.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah		Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang terlaksana		100%	188,054,500.00	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah		Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang terlaksana		100%	16,999,000.00
1.05.01.2.07.02	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Satpol PP	Jumlah Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	10	unit	80,144,500.00	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Satpol PP	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan			
1.05.01.2.07.05	Pengadaan Mebel	Satpol PP	Jumlah Pengadaan Mebel	5	unit	11,990,000.00	Pengadaan Mebel	Satpol PP	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan			
1.05.01.2.07.07	Pengadaan Aset Tetap Lainnya	Satpol PP	Jumlah Pengadaan Aset Tetap Lainnya	2	unit	95,920,000.00	Pengadaan Aset Tetap Lainnya	Satpol PP	Jumlah Unit Aset Tetap Lainnya yang Disediakan	1	Unit	Rp 16,999,000
5.01.01.2.07.10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Satpol PP	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	2	unit	-	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Satpol PP	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan			

RENCANA KERJA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KABUPATEN BANGKALAN 2023

			yang diadakan									
5.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		100%	7,000,760,160.00	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		100%	5,602,794,800.00
5.01.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Satpol PP	Jumlah Penyediaan Jasa Surat Menyurat	3	Jenis	7,975,000.00	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Satpol PP	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	4	Laporan	1,462,950.00
5.01.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Satpol PP	Jumlah Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	12	bulan	60,167,160.00	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Satpol PP	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12	Laporan	201,281,850.00
5.01.01.2.08.03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Satpol PP	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang disediakan	1	Laporan	-	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Satpol PP	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang disediakan			
5.01.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Satpol PP	Jumlah Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	12	bulan	6,932,618,000.00	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Satpol PP	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12	Laporan	5,400,050,000.00
5.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang terlaksana		95%	345,224,650.00	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang terlaksana		95%	256,543,600.00

RENCANA KERJA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KABUPATEN BANGKALAN 2023

5.01.01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Satpol PP	Jumlah Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang disediakan	3	Jenis	311,289,000.00	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Satpol PP	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	1	Unit	18,900,000.00
5.01.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Satpol PP	Jumlah Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang disediakan	12	bulan	9,900,000.00	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Satpol PP	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	19	Unit	225,188,600.00
5.01.01.2.09.07	Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	Satpol PP	Jumlah Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	12	bulan	24,035,650.00	Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	Satpol PP	Jumlah Aset Tetap Lainnya yang Dipelihara	16	Unit	1,100,000.00
5.10.01.2.09.05	Pemeliharaan Mebel	Satpol PP	Jumlah Mebel yang Dipelihara		Unit	-	Pemeliharaan Mebel	Satpol PP	Jumlah Mebel yang Dipelihara	3	Unit	850,000.00
5.10.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Satpol PP	Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya		Unit	-	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Satpol PP	Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara	4	Unit	4,625,000.00
5.01.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Satpol PP	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang dipelihara/ direhabilitasi		Unit	-	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Satpol PP	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang dipelihara/ direhabilitasi	1	Unit	5,880,000.00
5.01.01.2.09.10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Satpol PP	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang dipelihara/ direhabilitasi		Unit	-	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Satpol PP	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang dipelihara/ direhabilitasi			

1.05.02	PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM		Persentase Penyelenggaraan Peningkatan Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat		100%	989,330,520.00	PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM		Persentase Penyelenggaraan Peningkatan Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat		100%	2,165,140,250.00
5.01.02.2.01	Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota		Persentase Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum		100%	890,958,620.00	Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota		Persentase Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum		100%	84,350,000.00
1.05.02.2.01.01	Pencegahan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan Pengawasan	Satpol PP	Jumlah penyelenggaraan kegiatan Pencegahan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum melalui Deteksi dan Cegah dini	4	Kali	329,917,500.00	Pencegahan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan Pengawasan	Satpol PP	Jumlah Kasus Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum yang Dicegah Melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan Pengawasan	48	Kasus	7,250,000.00
			Jumlah kegiatan Patroli Trantibum yang dilaksanakan			-						
			Jumlah pembinaan dan penyuluhan yang dilaksanakan			-						
			Jumlah pelaksanaan kegiatan pengamanan dan pengawasan			-						

RENCANA KERJA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KABUPATEN BANGKALAN 2023

1.05.02.2.01.02	Penindakan atas Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Berdasarkan Perda dan Perkada melalui Penertiban dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa	Satpol PP	Jumlah penindakan atas gangguan Ketentraman dan Ketertiban	48	Kali	30,000,000.00	Penindakan atas Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Berdasarkan Perda dan Perkada melalui Penertiban dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa	Satpol PP	Jumlah Kasus Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum berdasarkan Perda dan Perkada Melalui Penertiban dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa yang Dilakukan Penindakan	5	Kasus	2,500,000.00
1.05.02.2.01.03	Koordinasi Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat Tingkat Kabupaten/Kota	Satpol PP	Jumlah penyelenggaraan koordinasi antar wilayah tingkat kecamatan	3	Kali	64,584,000.00	Koordinasi Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat Tingkat Kabupaten/Kota	Satpol PP	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Koordinasi Penyelenggaraan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Tingkat Kabupaten/Kota	1	Dokumen	30,000,000.00
1.05.02.2.01.07	Kerjasama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Teknik Pencegahan dan Penanganan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum	Satpol PP	Jumlah pelaksanaan patroli dalam kota	3	Kali	84,634,000.00	Kerjasama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Teknik Pencegahan dan Penanganan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum	Satpol PP	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Teknik Pencegahan Kejahatan	1	Dokumen	8,500,000.00
			Jumlah pelaksanaan operasi pekat			-						
1.05.02.2.01.08	Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Ketentraman dan Ketertiban Umum	Satpol PP	Jumlah sarana dan prasarana yang diadakan dan yang dipelihara	3	Kali	82,264,100.00	Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Ketentraman dan Ketertiban Umum	Satpol PP	Jumlah Sarana dan Prasarana Ketenteraman dan Ketertiban Umum yang Tersedia			
1.05.02.2.01.09	Penyusunan SOP Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat	Satpol PP	jumlah dokumen SOP			13,368,520.00	Penyusunan SOP Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat	Satpol PP	Jumlah Dokumen SOP Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat yang Telah Dibuat dan Dimutakhirkan	1	Dokumen	2,500,000.00
1.05.02.2.01.10	Penyediaan Layanan dalam rangka Dampak Penegakan Peraturan Daerah dan Perkada	Satpol PP	jumlah wni terdampak pelaksanaan kegiatan trantibum yang terlayani			61,765,000.00	Penyediaan Layanan dalam rangka Dampak Penegakan Peraturan Daerah dan Perkada	Satpol PP	Jumlah Laporan Penyediaan Layanan Dampak Penegakan Perda dan Perkada yang Terlayani	1	Laporan	4,600,000.00
1.05.02.2.01.04	Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketentraman dan Ketertiban Umum	Satpol PP	Jumlah pelaksanaan pemberdayaan SATLINMAS			127,950,000.00	Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketentraman dan Ketertiban Umum	Satpol PP	Jumlah Dokumen yang Memuat Hasil Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketenteraman dan Ketertiban	1	Dokumen	25,000,000.00

RENCANA KERJA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KABUPATEN BANGKALAN 2023

									Umum			
1.05.02.2.01.05	Peningkatan Kapasitas SDM Satuan Polisi Pamongpraja dan Satuan Perlindungan Masyarakat termasuk dalam Pelaksanaan Tugas yang Bernuansa Hak Asasi Manusia	Satpol PP	Jumlah penyelenggaraan peningkatan kapasitas SDM			96,475,500.00	Peningkatan Kapasitas SDM Satuan Polisi Pamongpraja dan Satuan Perlindungan Masyarakat termasuk dalam Pelaksanaan Tugas yang Bernuansa Hak Asasi Manusia	Satpol PP	Jumlah SDM Satuan Polisi Pamongpraja dan Satuan Perlindungan Masyarakat yang Ditingkatkan Kapasitasnya	20	Orang	4,000,000.00
1.05.02.2.02	Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/Wali Kota		Terselenggaranya Pelaksanaan Kegiatan Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/Wali Kota		100%	81,252,050.00	Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/Wali Kota		Terselenggaranya Pelaksanaan Kegiatan Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/Wali Kota		100%	2,076,790,250.00
1.05.02.2.02.01	Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota	Satpol PP	jumlah peserta yang mendapatkan sosialisasi	500	Orang	33,341,050.00	Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota	Satpol PP	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Sosialisasi Penegakan Perda/Perkada kepada Masyarakat/Kelompok Masyarakat/Pelaku Usaha/	53	Laporan	1,821,985,400.00
1.05.02.2.02.02	Pengawasan atas Kepatuhan terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota	Satpol PP	jumlah penyelenggaraan pengawasan	56	Kali	30,245,600.00	Pengawasan atas Kepatuhan terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota	Satpol PP	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Pengawasan yang Dilakukan Terhadap Kepatuhan Terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota	6	Laporan	4,804,850.00
1.05.02.2.02.03	Penanganan atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota	Satpol PP	jumlah penanganan pelanggaran Perda	48	Kali	17,665,400.00	Penanganan atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota	Satpol PP	Jumlah Laporan Pelaksanaan Penanganan Atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur yang Dapat Ditangani Sesuai SOP	108	Laporan	250,000,000.00
1.05.02.2.03	Pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Kabupaten/Kota		Terselenggaranya pelaksanaan kegiatan Pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Kabupaten/Kota		100%	17,119,850.00	Pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Kabupaten/Kota		Terselenggaranya pelaksanaan kegiatan Pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Kabupaten/Kota		100%	4,000,000.00

RENCANA KERJA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KABUPATEN BANGKALAN 2023

1.05.02.2.03.01	Pengembangan Kapasitas dan Karier PPNS	Satpol PP	jumlah aparatur yang mengikuti pengembangan Kapasitas dan karir PPNS	31	Orang	17,119,850.00	Pengembangan Kapasitas dan Karier PPNS	Satpol PP	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Pejabat PPNS dalam Mendukung Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat serta PenegakanPerda dan Perkada	1	Laporan	4,000,000.00
1.05.03	PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA		Persentase penyelenggaraan penanggulangan bencana		100%	237,662,240.00	PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA		Persentase penyelenggaraan penanggulangan bencana		100%	5,000,000.00
1.05.03.2.02	Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana		Terselenggaranya Pelaksanaan Kegiatan Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana		100%	78,964,435.00	Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana		Terselenggaranya Pelaksanaan Kegiatan Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana		100%	5,000,000.00
1.05.03.2.02.04	Penyediaan Peralatan Perlindungan dan Kesiapsiagaan terhadap Bencana	Satpol PP	Tersedianya Peralatan Perlindungan dan Kesiapsiagaan terhadap Bencana			61,775,250.00	Penyediaan Peralatan Perlindungan dan Kesiapsiagaan terhadap Bencana	Satpol PP	Jumlah Peralatan Penyelamatan Diri bagi Individu Warga Negara, Keluarga, maupun Petugas			
	Penanganan Pascabencana Kabupaten/Kota	Satpol PP	Jumlah Penanganan Pascabencana Kabupaten/Kota			-	Penanganan Pascabencana Kabupaten/Kota	Satpol PP				-
1.05.03.2.02.08	Pengembangan Kapasitas Tim Reaksi Cepat (TRC) Bencana Kabupaten/Kota	Satpol PP	jumlah penyelenggaraan pengembangan Tim Reaksi Cepat	2	Kali	17,189,185.00	Pengembangan Kapasitas Tim Reaksi Cepat (TRC) Bencana Kabupaten/Kota	Satpol PP	Jumlah Personil TRC yang Dikembangkan Kapasitas Teknis dan Manajerialnya	30	Orang	5,000,000.00
1.05.03.2.03	Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana		Terselenggaranya Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana		100%	158,697,805.00	Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana		Terselenggaranya Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana		100%	-
1.05.03.2.03.01	Respon Cepat Kejadian Luar Biasa Penyakit wabah zoonosis	Satpol PP	jumlah Respon Cepat Kejadian Luar Biasa Penyakit wabah zoonosis	50	Kali	75,000,000.00	Respon Cepat Kejadian Luar Biasa Penyakit wabah zoonosis	Satpol PP	Jumlah Laporan Koordinasi Respon Cepat Kejadian Luar Biasa Penyakit/Wabah Prioritas	0	Laporan	

RENCANA KERJA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KABUPATEN BANGKALAN 2023

1.05.03.2.03.02	Respon Cepat Darurat Bencana Kabupaten/Kota	Satpol PP	jumlah Respon Cepat Darurat Bencana Kabupaten/Kota	50	Kali	45,087,805.00	Respon Cepat Darurat Bencana Kabupaten/Kota	Satpol PP	SK Penetapan Status Darurat Bencana dan SKPDB yang Ditetapkan Paling Lama 1x24 Jam berdasarkan Hasil Dokumen Laporan Kaji Cepat			
1.05.03.2.03.03	Pencarian, Pertolongan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota	Satpol PP	jumlah pelaksanaan evakuasi	50	Kali	38,610,000.00	Pencarian, Pertolongan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota	Satpol PP	Jumlah Korban yang Berhasil Ditemukan, Ditolong, dan Dievakuasi Per Jenis Kejadian Bencana	0	Orang	
1:05:04	PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN		Persentase Penyelenggaraan Pelayanan Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Non Kebakaran		100%	47,840,700.00	PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN		Persentase Penyelenggaraan Pelayanan Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Non Kebakaran		100%	100,000,000.00
1.05.04.2.01	Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan, dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota		Terselenggaranya Pelaksanaan Kegiatan Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan, dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota		98%	34,314,700.00	Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan, dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota		Terselenggaranya Pelaksanaan Kegiatan Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan, dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota		98%	81,065,200.00
1.05.04.2.01.01	Pencegahan Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	Satpol PP	jumlah kegiatan pencegahan kebakaran	10	kegiatan	5,880,000.00	Pencegahan Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	Satpol PP	Jumlah Dokumen NSPM Pencegahan/Penangulangan Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota Setiap Tahunnya	3	Dokumen	24,435,000.00
1.05.04.2.01.02	Pemadaman dan Pengendalian Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	Satpol PP	jumlah pemadaman dan Pengendalian Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	25	kali	10,500,000.00	Pemadaman dan Pengendalian Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	Satpol PP	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Kegiatan Kesiapsiagaan Petugas Piket dan Pemadaman Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	20	Laporan	25,200,000.00
1.05.04.2.01.03	Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran dan Non Kebakaran	Satpol PP	jumlah kegiatan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran dan non kebakaran	20	kali	11,550,000.00	Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran dan Non Kebakaran	Satpol PP	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Kegiatan Kesiapsiagaan Petugas Piket dan Penyelamatan/Evakuasi Saat Penanggulangan Kebakaran dan	20	Dokumen	21,000,000.00

RENCANA KERJA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KABUPATEN BANGKALAN 2023

								Non Kebakaran				
1.05.04.2.01.06	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri	Satpol PP	jumlah jenis sarana dan prasarana pencegahan, penanggulangan kebakaran, pencarian, pertolongan dan evakuasi terhadap kondisi membahayakan yang diadakan	1	jenis	5,484,700.00	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri	Satpol PP	Jumlah Sarana dan Prasarana Untuk Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri yang Sah dan Legal Sesuai Standar Teknis Terkait	8	Unit	6,040,200.00
1.05.04.2.01.07	Pembinaan Aparatur Pemadam Kebakaran	Satpol PP	Jumlah Pelaksanaan pembinaan aparatur pemadam kebakaran	2	Kali	900,000.00	Pembinaan Aparatur Pemadam Kebakaran	Satpol PP	Jumlah Aparatur Pemadam Kebakaran yang Memiliki Sertifikasi Keterampilan Teknis dan Analis Dalam Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran	28	Orang	4,390,000.00
1.05.04.2.02	Inspeksi Peralatan Proteksi Kebakaran		Terselenggaranya Pelaksanaan Kegiatan Inspeksi Proteksi Kebakaran		100%	1,710,000.00	Inspeksi Peralatan Proteksi Kebakaran		Terselenggaranya Pelaksanaan Kegiatan Inspeksi Proteksi Kebakaran		100%	3,310,000.00
1.05.04.2.02.01	Pendataan Sarana Prasarana Proteksi Kebakaran	Satpol PP	Jumlah Laporan data tersedianya Sarana Prasarana Proteksi Kebakaran	1	Dokumen	1,035,000.00	Pendataan Sarana Prasarana Proteksi Kebakaran	Satpol PP	Jumlah Dokumen yang Memuat Data Bangunan/Gedung/Lingkungan yang Diperkirakan Harus Memiliki Sistem Proteksi Kebakaran	2	Dokumen	2,160,000.00
1.05.04.2.02.02	Penilaian Sarana Prasarana Proteksi Kebakaran	Satpol PP	Jumlah laporan data Sarana Prasarana Proteksi Kebakaran yang layak	1	Dokumen	675,000.00	Penilaian Sarana Prasarana Proteksi Kebakaran	Satpol PP	Jumlah Dokumen yang Memuat Data Bangunan/Gedung/Lingkungan yang Memenuhi Kelaikan Standar Sarana Prasarana Proteksi Kebakaran	2	Dokumen	1,150,000.00
1.05.04.2.03	Investigasi Kejadian Kebakaran		Terselenggaranya Kegiatan Investigasi Kejadian kebakaran			-	Investigasi Kejadian Kebakaran		Terselenggaranya Kegiatan Investigasi Kejadian kebakaran			-

RENCANA KERJA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KABUPATEN BANGKALAN 2023

1.05.04.2.03.01	Investigasi Kejadian Kebakaran, meliputi Penelitian dan Pengujian Penyebab Kejadian Kebakaran	Satpol PP	Jumlah Investigasi Kejadian Kebakaran, meliputi Penelitian dan Pengujian Penyebab Kejadian Kebakaran	10	Laporan	-	Investigasi Kejadian Kebakaran, meliputi Penelitian dan Pengujian Penyebab Kejadian Kebakaran	Satpol PP	Jumlah Dokumen yang Memuat Hasil Kejadian Kebakaran yang Dilakukan Investigasi Lanjutan Meliputi Penelitian dan Pengujian dan Penelitian	0	Dokumen	-
1.05.04.2.04	Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan Kebakaran		Terselenggaranya Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan Kebakaran		100%	750,000.00	Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan Kebakaran		Terselenggaranya Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan Kebakaran		100%	3,080,000.00
1.05.04.2.04.01	Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran melalui Sosialisasi dan Edukasi Masyarakat	Satpol PP	cakupan kegiatan sosialisasi dan edukasi masyarakat dalam pencegahan penanggulangan kebakaran	9	Kecamatan	750,000.00	Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran melalui Sosialisasi dan Edukasi Masyarakat	Satpol PP	Jumlah Warga Masyarakat yang Mendapatkan Sosialisasi Edukasi Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran Setiap Tahunnya	18	Orang	3,080,000.00
1.05.04.2.05	Penyelenggaraan Operasi Pencarian dan Pertolongan terhadap Kondisi Membahayakan Manusia		Terselenggaranya Penyelenggaraan Operasi Pencarian dan Pertolongan terhadap Kondisi Membahayakan Manusia		100%	11,066,000.00	Penyelenggaraan Operasi Pencarian dan Pertolongan terhadap Kondisi Membahayakan Manusia		Terselenggaranya Penyelenggaraan Operasi Pencarian dan Pertolongan terhadap Kondisi Membahayakan Manusia		100%	12,544,800.00
1.05.04.2.05.03	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pencarian dan Pertolongan terhadap Kondisi Membahayakan Manusia/Penyelamatan dan Evakuasi	Satpol PP	jumlah Sarana dan Prasarana Pencarian dan Pertolongan terhadap Kondisi Membahayakan yang diadakan	20	Jenis	11,066,000.00	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pencarian dan Pertolongan terhadap Kondisi Membahayakan Manusia/Penyelamatan dan Evakuasi	Satpol PP	Jumlah Sarana dan Prasarana yang Tersedia untuk Pencarian dan Pertolongan Terhadap Kondisi Membahayakan Manusia/Penyelamatan dan Evakuasi Sesuai dengan Standar Teknis	9	Unit	12,544,800.00
TOTAL						15,903,769,951.00	TOTAL					14,466,187,726.00

2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017, usulan program dan kegiatan masyarakat diuraikan dalam hasil kajian terhadap program/ kegiatan yang diusulkan para pemangku kepentingan, baik dari kelompok masyarakat terkait langsung dengan pelayanan provinsi, LSM, asosiasi-asosiasi, perguruan tinggi maupun dari Perangkat Daerah kabupaten/kota yang langsung ditujukan kepada Perangkat Daerah maupun berdasarkan hasil pengumpulan informasi Perangkat Daerah dari penelitian lapangan dan pengamatan pelaksanaan musrenbang kabupaten/kota. Dari uraian diatas, tidak ada usulan pemangku kepentingan yang ditujukan kepada Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Bangkalan.

Tabel 2.4.

Usulan Program dan Kegiatan Dari Para Pemangku Kepentingan Tahun 2023

No	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Volume	Catatan
			NIHIL		

BAB III

TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

3.1. Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional

Telaahan terhadap kebijakan nasional menyangkut arah kebijakan dan prioritas pembangunan nasional yang terkait dengan tugas pokok dan fungsi Perangkat Daerah. Arah kebijakan pembangunan untuk tahun 2023 yaitu “Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik”. Arah kebijakan ini harus menjadi prioritas dan sasaran pembangunan daerah yang padu dan mampu memberdayakan segenap potensi daerah dan pemerintah daerah sekaligus memanfaatkan segala peluang yang ada.

3.2. Tujuan dan Sasaran Renja Satpol PP

Tujuan dan Sasaran Renja Satpol PP Kabupaten Bangkalan Tahun 2023 didasarkan atas rumusan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi pada Perubahan Rencana Strategis Satpol PP Kabupaten Bangkalan Tahun 2018-2023 sebagai berikut:

a. Tujuan

Adapun tujuan yang telah dirumuskan dalam perencanaan strategis adalah *Terpeliharanya ketenteraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat sesuai peraturan dan perundang-undangan.*

b. Sasaran

Berdasarkan tujuan yang ditetapkan, maka Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Bangkalan menentukan sasaran utama pelaksanaan tugas sesuai Tugas Pokok dan Fungsi Lembaga Sebagai Berikut:

- a) Pelayanan ketenteraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat yang terselenggara.
- b) Penyelenggaraan pelayanan penanggulangan bencana
- c) Terpenuhinya pelayanan kesekretariatan

Gambaran tujuan dan sasaran Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Bangkalan, dapat dilihat pada tabel Tugas dan Sasaran Perangkat Daerah Tahun 2023 sebagai berikut :

Tabel 3.1 Tujuan dan Sasaran Perangkat Daerah

Tujuan		Target		Sasaran		Target		Ket
Uraian	Indikator Kinerja	2022	2023	Uraian	Indikator Kinerja	2022	2023	
Terpeliharanya stabilitas ketenteraman dan ketertiban umum serta perlindungan kepada masyarakat sesuai peraturan dan perundang-undangan	Cakupan Penegakan Peraturan Daerah dan atau Peraturan Kepala Daerah	80%	85%	Terselenggaranya pelayanan Ketentraman dan Ketertiban Umum serta perlindungan masyarakat	Persentase Penyelenggaraan ketertiban umum dan Ketentraman masyarakat	100%	100%	
					Persentase Penyelenggaraan Penegakan Peraturan Daerah/Peraturan Kepala Daerah	100%	100%	
					Persentase penyelenggaraan perlindungan masyarakat	100%	100%	
	Persentase Tercapainya Pelayanan Penanggulangan bencana kepada Masyarakat	100%	100%	Terselenggaranya penanggulangan kebencanaan	Persentase penyelenggaraan penanggulangan bencana	100%	100%	
					Persentase penyelenggaraan penanggulangan kebakaran dan penyelamatan non kebakaran	100%	100%	
Meningkatnya kinerja urusan bidang Tramtibum Linmas dan Kebencanaan	Persentase Ketercapaian kinerja urusan bidang Tramtibum Linmas dan Kebencanaan	100%	100%	terpenuhinya pelayanan kesekretariatan	Indeks Kepuasan Aparatur terhadap pelayanan kesekretariatan	100%	100%	

BAB IV

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN SATPOL PP

4.1 Program dan Kegiatan

Rencana kerja dan pendanaan tahun 2023 berisi program, kegiatan dan sub kegiatan serta pagu indikatif yang dirancang untuk mendukung terwujudnya capaian Perubahan Rencana Strategis (P-RENSTRA) Tahun 2018-2023 Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Bangkalan untuk mendukung prioritas pembangunan daerah, dan prioritas perangkat daerah maupun untuk pemenuhan pelayanan Perangkat Daerah dalam menyelenggarakan urusan pemerintah daerah.

Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2023 dan Prakiraan Maju Tahun 2024 adalah sebagaimana tertuang dalam Tabel 4.1 dibawah ini:

**Tabel 4.1 Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2023
Dan Perkiraan Maju Tahun 2024**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2023				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
5.01.01	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten / Kota	Persentase terpenuhinya penunjang urusan pemerintahan		100%	Rp 12,196,047,476			100%	Rp 12,302,297,476	
5.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase tersusunnya Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		100%	Rp 32,649,550			100%	Rp 32,649,550	
5.01.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Satpol PP	3	Dokumen	Rp 18,212,150	APBD	2	Dokumen	Rp 18,212,150
5.01.01.2.01.02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Satpol PP	1	Dokumen	Rp 1,736,000	APBD	1	Dokumen	Rp 1,736,000
5.01.01.2.01.03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Satpol PP	1	Dokumen	Rp 1,729,750	APBD	1	Dokumen	Rp 1,729,750
5.01.01.2.01.04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Satpol PP	1	Dokumen	Rp 378,150	APBD	1	Dokumen	Rp 378,150

RENCANA KERJA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KABUPATEN BANGKALAN 2023

5.01.01.2.01.05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	Satpol PP	1	Dokumen	Rp	378,150	APBD		1	Dokumen	Rp	378,150
5.01.01.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Satpol PP	1	Laporan	Rp	3,594,050	APBD		1	Laporan	Rp	3,594,050
5.01.01.2.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang disusun	Satpol PP	6	Laporan	Rp	6,621,300			6	Laporan	Rp	6,621,300
5.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Keuangan Perangkat Daerah yang terpenuhi			100%	Rp	6,197,444,676				100%	Rp	6,197,444,676
5.01.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah orang yang menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Satpol PP	80	Orang/bulan	Rp	6,184,470,476	APBD		80	Orang/bulan	Rp	6,184,470,476
5.01.01.2.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Satpol PP	1	Laporan	Rp	7,139,550	APBD		1	Laporan	Rp	7,139,550
5.01.01.2.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/ Semesteran SKPD	Satpol PP	18	Laporan	Rp	5,834,650	APBD		18	Laporan	Rp	5,834,650
5.01.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah yang tersusun			100%	Rp	1,611,350				100%	Rp	1,611,350

RENCANA KERJA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KABUPATEN BANGKALAN 2023

5.01.01.2.03.01	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Satpol PP								
5.01.01.2.03.05	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Satpol PP	7	Laporan	Rp 1,611,350	APBD		7	Laporan	Rp 1,611,350
5.01.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah yang terlaksana			100%	Rp 23,672,000				100%	Rp 140,821,000
5.01.01.2.05.02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Satpol PP	0	Paket		APBD		335	Paket	Rp 125,821,000
5.01.01.2.05.09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	Satpol PP	11	Orang	Rp 23,672,000	APBD		5	Orang	Rp 15,000,000
5.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Penyediaan Administrasi Umum Perangkat Daerah			100%	Rp 64,332,500				100%	Rp 64,332,500
5.01.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang disediakan	Satpol PP	4	Paket	Rp 1,791,800	APBD		4	Paket	Rp 1,791,800
5.01.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang disediakan	Satpol PP	12	Paket	Rp 15,662,600	APBD		12	Paket	Rp 15,662,600
5.01.01.2.06.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Satpol PP	12	Paket	Rp 1,828,750	APBD		2	Paket	Rp 1,828,750
5.01.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang disediakan	Satpol PP	8	Paket	Rp 9,000,000	APBD		24	Paket	Rp 9,000,000
5.01.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang disediakan	Satpol PP	12	Paket	Rp 981,350	APBD		12	Paket	Rp 981,350

RENCANA KERJA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KABUPATEN BANGKALAN 2023

5.01.01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang disediakan	Satpol PP	4	Dokumen	Rp 1,620,000	APBD		4	Dokumen	Rp 1,620,000
5.01.01.2.06.08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Satpol PP	12	Laporan	Rp 4,958,000	APBD		12	Laporan	Rp 4,958,000
5.01.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Satpol PP	10	Laporan	Rp 28,490,000	APBD		50	Laporan	Rp 28,490,000
5.01.01.2.06.11	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Satpol PP	0	Dokumen	Rp -	APBD		0	Dokumen	Rp -
5.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah	Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang terlaksana			100%	Rp 16,999,000				100%	Rp -
1.05.01.2.07.02	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	Satpol PP	0	Unit		APBD		0	Unit	Rp -
1.05.01.2.07.05	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Satpol PP	0	Unit		APBD		0	Unit	Rp -
1.05.01.2.07.07	Pengadaan Aset Tetap Lainnya	Jumlah Unit Aset Tetap Lainnya yang Disediakan	Satpol PP	1	Unit	Rp 16,999,000	APBD		0	Unit	Rp -
5.01.01.2.07.10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang disediakan	Satpol PP	0	Unit		APBD		0	Unit	Rp -
5.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			100%	Rp 5,602,794,800				100%	Rp 5,602,794,800
5.01.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Satpol PP	4	Laporan	Rp 1,462,950	APBD		4	Laporan	Rp 1,462,950

RENCANA KERJA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KABUPATEN BANGKALAN 2023

5.01.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang disediakan	Satpol PP	12	Laporan	Rp	201,281,850	APBD		12	Laporan	Rp	201,281,850
5.01.01.2.08.03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang disediakan	Satpol PP	0	Laporan	Rp	-	APBD		1	Laporan	Rp	-
5.01.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang disediakan	Satpol PP	12	Laporan	Rp	5,400,050,000	APBD		12	Laporan	Rp	5,400,050,000
5.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang terlaksana			100%	Rp	256,543,600				100%	Rp	262,643,600
5.01.01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang dipelihara dan dibayarkan pajaknya	Satpol PP	1	Unit	Rp	18,900,000	APBD		2	Unit	Rp	25,000,000
5.01.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang dipelihara dan dibayarkan pajak dan perizinannya	Satpol PP	19	Unit	Rp	225,188,600	APBD		20	Unit	Rp	225,188,600
5.01.01.2.09.07	Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	Jumlah Aset Tetap Lainnya yang Dipelihara	Satpol PP	16	Unit	Rp	4,625,000	APBD		24	Unit	Rp	4,625,000
5.01.01.2.09.05	Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang dipelihara	Satpol PP	3	Unit	Rp	1,100,000	APBD		10	Unit	Rp	1,100,000
5.10.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Satpol PP	4	Unit	Rp	850,000	APBD		35	Unit	Rp	850,000
5.01.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang dipelihara/ direhabilitasi	Satpol PP	1	Unit	Rp	5,880,000	APBD		1	Unit	Rp	5,880,000

RENCANA KERJA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KABUPATEN BANGKALAN 2023

5.01.01.2.09.10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang dipelihara/ direhabilitasi	Satpol PP	0	Unit	Rp	-	APBD		10	Unit	Rp	-
1.05.02	PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase Penyelenggaraan Peningkatan Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat			100%	Rp	2,165,140,250				100%	Rp	2,165,140,250
5.01.02.2.01	Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota			100%	Rp	84,350,000				100%	Rp	84,350,000
1.05.02.2.01.01	Pencegahan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan Pengawasan	Jumlah Kasus Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum yang Dicegah Melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan Pengawasan	Satpol PP	48	Kasus	Rp	7,250,000	APBD		100	Kasus	Rp	7,250,000
1.05.02.2.01.02	Penindakan atas Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Berdasarkan Perda dan Perkada melalui Penertiban dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa	Jumlah Kasus Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum berdasarkan Perda dan Perkada Melalui Penertiban dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa yang Dilakukan Penindakan	Satpol PP	5	Kasus	Rp	2,500,000	APBD		20	Kasus	Rp	2,500,000

RENCANA KERJA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KABUPATEN BANGKALAN 2023

1.05.02.2.01.03	Koordinasi Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Koordinasi Penyelenggaraan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Tingkat Kabupaten/Kota	Satpol PP	1	Dokumen	Rp	30,000,000	APBD		20	Dokumen	Rp	30,000,000
1.05.02.2.01.04	Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Jumlah Dokumen yang Memuat Hasil Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Satpol PP	1	Dokumen	Rp	25,000,000	APBD		18	Dokumen	Rp	25,000,000
1.05.02.2.01.05	Peningkatan Kapasitas SDM Satuan Polisi Pamongpraja dan Satuan Perlindungan Masyarakat termasuk dalam Pelaksanaan Tugas yang Bernuansa Hak Asasi Manusia	Jumlah SDM Satuan Polisi Pamongpraja dan Satuan Perlindungan Masyarakat yang Ditingkatkan Kapasitasnya	Satpol PP	20	Orang	Rp	4,000,000	APBD		250	Orang	Rp	4,000,000
1.05.02.2.01.07	Kerjasama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Teknik Pencegahan dan Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Teknik Pencegahan Kejahatan	Satpol PP	1	Dokumen	Rp	8,500,000	APBD		4	Dokumen	Rp	8,500,000
1.05.02.2.01.08	Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Jumlah Sarana dan Prasarana Ketenteraman dan Ketertiban Umum yang Tersedia	Satpol PP		Unit	Rp	-	APBD		143	Unit	Rp	-

RENCANA KERJA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KABUPATEN BANGKALAN 2023

1.05.02.2.01.09	Penyusunan SOP Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat	Jumlah Dokumen SOP Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat yang Telah Dibuat dan Dimutakhirkan	Satpol PP	1	Dokumen	Rp	2,500,000	APBD		1	Dokumen	Rp	2,500,000
1.05.02.2.01.10	Penyediaan Layanan dalam rangka Dampak Penegakan Peraturan Daerah dan Perkada	Jumlah Laporan Penyediaan Layanan Dampak Penegakan Perda dan Perkada yang Terlayani	Satpol PP	1	Laporan	Rp	4,600,000	APBD			Laporan	Rp	4,600,000
1.05.02.2.02	Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/Wali Kota	Terselenggaranya Pelaksanaan Kegiatan Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/Wali Kota			100%	Rp	2,076,790,250				100%	Rp	2,076,790,250
1.05.02.2.02.01	Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Sosialisasi Penegakan Perda/Perkada kepada Masyarakat/Kelompok Masyarakat/Pelaku Usaha/	Satpol PP	53	Laporan	Rp	1,821,985,400	APBD		4	Laporan	Rp	1,821,985,400
1.05.02.2.02.02	Pengawasan atas Kepatuhan terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Pengawasan yang Dilakukan Terhadap Kepatuhan Terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota	Satpol PP	6	Laporan	Rp	4,804,850	APBD		41	Laporan	Rp	4,804,850
1.05.02.2.02.03	Penanganan atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota	Jumlah Laporan Pelaksanaan Penanganan Atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur yang Dapat Ditangani Sesuai SOP	Satpol PP	108	Laporan	Rp	250,000,000	APBD		25	Laporan	Rp	250,000,000

RENCANA KERJA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KABUPATEN BANGKALAN 2023

1.05.02.2.03	Pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Kabupaten/Kota	Terselenggaranya pelaksanaan kegiatan Pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Kabupaten/Kota			100%	Rp	4,000,000				100%	Rp	4,000,000
1.05.02.2.03.01	Pengembangan Kapasitas dan Karier PPNS	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Pejabat PPNS dalam Mendukung Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat serta Penegakan Perda dan Perkada	Satpol PP	1	Laporan	Rp	4,000,000	APBD		2	Laporan	Rp	4,000,000
1.05.03	PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA	Persentase penyelenggaraan penanggulangan bencana			100%	Rp	5,000,000				100%	Rp	5,000,000
1.05.03.2.02	Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	Terselenggaranya Pelaksanaan Kegiatan Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana			100%	Rp	5,000,000				100%	Rp	5,000,000
1.05.03.2.02.02	Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah Warga Negara dan Aparatur yang Mengikuti Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana	Satpol PP	0	Orang	Rp	-	APBD		0	Orang	Rp	-
1.05.03.2.02.04	Penyediaan Peralatan Perlindungan dan Kesiapsiagaan terhadap Bencana	Jumlah Peralatan Penyelamatan Diri bagi Individu Warga Negara, Keluarga, maupun Petugas	Satpol PP		Unit			APBD		0	Unit	Rp	-
1.05.03.2.02.08	Pengembangan Kapasitas Tim Reaksi Cepat (TRC) Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah Personil TRC yang Dikembangkan Kapasitas Teknis dan Manajerialnya	Satpol PP	30	Orang	Rp	5,000,000	APBD		30	Orang	Rp	5,000,000

RENCANA KERJA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KABUPATEN BANGKALAN 2023

1.05.03.2.03	Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	Terselenggaranya Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana			100%	Rp -				100%	Rp -
1.05.03.2.03.01	Respon Cepat Kejadian Luar Biasa Penyakit wabah zoonosis	Jumlah Laporan Koordinasi Respon Cepat Kejadian Luar Biasa Penyakit/Wabah Prioritas	Satpol PP	0	Laporan	Rp -	APBD		0	Laporan	Rp -
1.05.03.2.03.03	Pencarian, Pertolongan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah Korban yang Berhasil Ditemukan, Ditolong, dan Dievakuasi Per Jenis Kejadian Bencana	Satpol PP	0	Orang	Rp -	APBD		0	Orang	Rp -
1:05:04	PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN, KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN	Persentase Penyelenggaraan Pelayanan Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Non Kebakaran			100%	Rp 100,000,000				100%	Rp 100,000,000
1.05.04.2.01	Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan, dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	Terselenggaranya Pelaksanaan Kegiatan Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan, dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota			100%	Rp 81,065,200				100%	Rp 81,065,200
1.05.04.2.01.01	Pencegahan Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen NSPM Pencegahan/Penanggulangan Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota Setiap Tahunnya	Satpol PP	3	Dokumen	Rp 24,435,000	APBD		20	Dokumen	Rp 24,435,000

RENCANA KERJA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KABUPATEN BANGKALAN 2023

1.05.04.2.01.02	Pemadaman dan Pengendalian Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Kegiatan Kesiapsiagaan Petugas Piket dan Pemadaman Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	Satpol PP	20	Laporan	Rp	25,200,000	APBD		25	Laporan	Rp	25,200,000
1.05.04.2.01.03	Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran dan Non Kebakaran	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Kegiatan Kesiapsiagaan Petugas Piket dan Penyelamatan/Evakuasi Saat Penanggulangan Kebakaran dan Non Kebakaran	Satpol PP	20	Dokumen	Rp	21,000,000	APBD		30	Dokumen	Rp	21,000,000
1.05.04.2.01.06	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri	Jumlah Sarana dan Prasarana Untuk Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri yang Sah dan Legal Sesuai Standar Teknis Terkait	Satpol PP	8	Unit	Rp	6,040,200	APBD		3	Unit	Rp	6,040,200
1.05.04.2.01.07	Pembinaan Aparatur Pemadam Kebakaran	Jumlah Aparatur Pemadam Kebakaran yang Memiliki Sertifikasi Keterampilan Teknis dan Analis Dalam Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran	Satpol PP	28	Orang	Rp	4,390,000	APBD		16	Orang	Rp	4,390,000
1.05.04.2.02	Inspeksi Peralatan Proteksi Kebakaran	Terselenggaranya Pelaksanaan Kegiatan Inspeksi Proteksi Kebakaran			100%	Rp	3,310,000				100%	Rp	3,310,000

RENCANA KERJA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KABUPATEN BANGKALAN 2023

1.05.04.2.02.01	Pendataan Sarana Prasarana Proteksi Kebakaran	Jumlah Dokumen yang Memuat Data Bangunan/Gedung/Lingkungan yang Dipersyaratkan Harus Memiliki Sistem Proteksi Kebakaran	Satpol PP	2	Dokumen	Rp	2,160,000	APBD		2	Dokumen	Rp	2,160,000
1.05.04.2.02.02	Penilaian Sarana Prasarana Proteksi Kebakaran	Jumlah Dokumen yang Memuat Data Bangunan/Gedung/Lingkungan yang Memenuhi Kelaikan Standar Sarana Prasarana Proteksi Kebakaran	Satpol PP	2	Dokumen	Rp	1,150,000	APBD		2	Dokumen	Rp	1,150,000
1.05.04.2.04	Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan Kebakaran	Terselenggaranya Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan Kebakaran			100%	Rp	3,080,000				100%	Rp	3,080,000
1.05.04.2.04.01	Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran melalui Sosialisasi dan Edukasi Masyarakat	Jumlah Warga Masyarakat yang Mendapatkan Sosialisasi Edukasi Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran Setiap Tahunnya	Satpol PP	18	Orang	Rp	3,080,000	APBD		20	Orang	Rp	3,080,000
1.05.04.2.05	Penyelenggaraan Operasi Pencarian dan Pertolongan terhadap Kondisi Membahayakan Manusia	Terselenggaranya Penyelenggaraan Operasi Pencarian dan Pertolongan terhadap Kondisi Membahayakan Manusia			100%	Rp	12,544,800				100%	Rp	12,544,800

RENCANA KERJA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KABUPATEN BANGKALAN 2023

1.05.04.2.05.03	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pencarian dan Pertolongan terhadap Kondisi Membahayakan Manusia/ Penyelamatan dan Evakuasi	Jumlah Sarana dan Prasarana yang Tersedia untuk Pencarian dan Pertolongan Terhadap Kondisi Membahayakan Manusia/ Penyelamatan dan Evakuasi Sesuai dengan Standar Teknis	Satpol PP	9	Unit	Rp 12,544,800	APBD		32	Unit	Rp 12,544,800
TOTAL						Rp 14,466,187,726					Rp 14,572,437,726

BAB V

PENUTUP

Rencana Kerja Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Bangkalan Tahun 2023 merupakan perencanaan tahunan yang sifatnya operasional yang menjembatani antara perencanaan tahunan serta jangka menengah Perangkat Daerah dengan RKPD dan P-RPJMD dalam mendukung pencapaian Visi dan Misi Daerah. Untuk menjaga kesinambungan pencapaian tujuan dan sasaran Perangkat Daerah, diharapkan dapat menjaga konsistensi antara RKPD, Renja dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran dengan penuh tanggung jawab. Dalam pelaksanaan program kegiatan, efektivitas kerja sangat perlu dilakukan guna untuk memantau dan mengevaluasi hasil kinerja yang telah dilakukan terhadap pelaksanaan Renja Tahun 2023.

Penetapan Renja PD Tahun 2023 memiliki rentang waktu yang cukup lama dengan proses penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, hal ini tentunya memberikan peluang adanya pergeseran atau perubahan rencana yang akan dilakukan pada proses penganggaran R-APBD. Hal tersebut dapat disebabkan oleh faktor eksternal dan internal di Kabupaten Bangkalan meliputi perubahan kebijakan atau peraturan perundang-undangan dari Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Provinsi Jawa Timur; perkembangan dan dinamika yang terjadi pada masyarakat; ketersediaan anggaran; dan beberapa hal lain yang mempengaruhi kebijakan penganggaran. Dengan adanya Rancangan Akhir Renja Tahun 2023, maka dapat digunakan sebagai acuan dalam penyusunan Rencana Kerja Anggaran (RKA) dengan berpedoman pada Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

Bangkalan, Agustus 2022
KEPALA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
KABUPATEN BANGKALAN



RUBIANTO.S.SOS.MM

Pembina Utama Muda
 NIP. 19740513 199302 1 001